



Defisit Anggaran, Proyek Diskop Dipangkas

'Ya, tidak bisa, karena tidak ada anggaran. APBD 2015 saja mengalami defisit Rp 72 miliar, uang yang ada dari Silpa dialokasikan menutupi defisit itu,'

Bappeda Karangasem

AMLAPURA, NusaBali

Pihak Badan Pelencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Karangasem menolak usulan DED (detail engineering design) senilai Rp 500 juta yang merupakan perencanaan membangun gedung pelatihan, dan perbaikan gedung Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Karangasem. Hal itu dilakukan karena defisit anggaran meskipun aksesnya, ke depan tidak ada pem-



Nengah Mendra

benahan di bidang infrastruktur peningkatan sumber daya manusia pengelola Koperasi dan LPD.

Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta memaparkan hal ini di Amlapura, Minggu (7/6). Bahkan Sedana Merta secara tegas melakukan penolakan usulan itu karena minimnya dana di Karangasem. "Ya, tidak bisa, karena tidak ada anggaran. APBD 2015 saja mengalami defisit Rp



Sedana Merta

72 miliar, uang yang ada berasal dari Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dialokasikan menutupi defisit itu," ujar Sedana Merta.

Mengenai Silpa yang ada Rp 150 miliar, tetapi untuk menutupi defisit Rp 72 miliar, logikanya ada sisa anggaran. "Anggaran itu juga untuk menutupi kekurangan dana yang lain, setelah terbagi-bagi, akhirnya habis terbagi rata.

Edisi : Senin, 8 Juni 2015

Hal : 8



Sambungan

Makanya kami tolak usulan dari Dinas Koperasi dan UKM," tambah Sedana Merta.

Disinggung capaian PAD Karangasem selama Januari-Mei 2015, ada pemasukan melebihi target terutama dari galian C dan pajak hotel dan restoran, Sedana Merta memang mengagui. "Meski demikian, masih perlu dikaji dan dihitung ulang, mengenai kemampuan keuangan daerah," kilahnya.

Sementara Kepala Diskop dan UKM Karangasem I Nengah Mendra sendiri mengaku sangat menyayangkan, usulan merancang perencanaan melalui menyusun DED, yang sedianya diajukan di pembahasan RAPBD Perubahan 2015, mendapatkan penolakan. Dihubungi secara terpisah di Amlapura, Minggu kemarin, kata Mendra, rencana menyusun DED tersebut untuk membangun gedung pelatihan pengelolaan LPD dan Koperasi. Sehingga SDM diharapkan bisa meningkat, kinerjanya kian profesional. Di samping tujuannya,

memperluas Kantor Koperasi dan UKM, dengan berlantai II. Sehingga ada ruang rapat, ruang kerja lebih representatif dan parkir lebih memadai. Selama ini, kondisinya sumpek, padahal lahan telah tersedia.

"Kenyataannya selama ini kita tidak punya ruang rapat, dan ruang untuk pelatihan, mau rapat, kebingungan pinjam tempat, mau pelatihan kesulitan tempat. Jadi tolong juga kesulitan kami dimengerti," pinta Mendra.

Rencananya kata Mendra untuk tahun 2015, menyusun DED dengan memanfaatkan rekanan bidang konsultan perencana, selanjutnya tahun 2016, berlanjut ke pembangunan fisik dengan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar.

Atas penolakan usulan DED tersebut, Kantor Dinas Koperasi dan UKM, merupakan satu-satunya kantor yang belum ada penataan. Selebihnya di SKPD lainnya telah memiliki gedung baru, bahkan 8 kantor baru camat se-Karangasem telah terbangun, semuanya berlantai II. **k16**



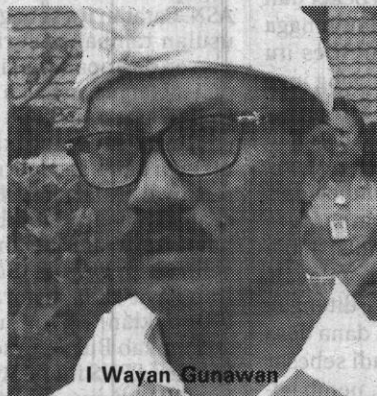
Pansus Aset Tawarkan Pemprov Jual Aset Tercecer

DENPASAR, NusaBali

Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Wayan Gunawan mengusulkan agar aset-aset milik Pemprov Bali yang tercecer supaya dijual, hasilnya bisa dialihkan untuk kepentingan usaha yang bisa mendatangkan pendapatan daerah.

Kata dia, pihaknya sudah berusaha kerja mewujudkan penataan aset yang tercecer. Hasilnya, hampir di seluruh kabupaten dan kota aset Pemprov Bali ditemukan tidak terurus. Terutama soal data dan legalitasnya. "Sebenarnya kita sudah jajaki ke kabupaten dan kota. Banyak ditemukan aset Pemprov Bali tercecer. Kita kedepan mau pikirkan sebuah transaksional dengan menjual aset yang tercecer. Terutama aset-aset tanah yang luasnya kurang dari 3 are," ujar Gunawan di Denpasar, Minggu (7/6).

Menurutnya, aset tanah yang kurang dari 3 are itu hanya membebani APBD Bali saja. Sebab membuat plang nama, menjaga supaya papan nama tidak dicabut perlu biaya besar. "Solusinya adalah disewakan kepada pihak ketiga atau dijual. Hasilnya nanti dibelikan aset tanah dengan luas maksimal untuk dikembangkan jadi tempat usaha yang bisa mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," usul pria yang juga Ketua



I Wayan Gunawan

Fraksi Golkar DPRD Bali ini.

Kata Gunawan, nanti Pansus Aset DPRD Bali merencanakan ada klaster-klaster soal aset yang akan dijual untuk kemudian dikembangkan. "Kalau yang berpotensi pakai usaha oleh Pemprov Bali kita tetap pertahankan," ujarnya.

Gunawan mengatakan Pansus Aset DPRD Bali akan mengkaji pengelolaan aset oleh pihak ketiga. "Bisa evaluasi. Bisa dikaji ulang. Kalau yang dikelola pihak ketiga bisa saja dengan pengawasannya kita perketat supaya benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemerintah daerah serta jelas retribusinya masuk ke kas daerah," ujarnya.

Pengawasan aset selama ini berpedoman dengan Peraturan

Gubernur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Gunawan mengatakan selama ini memang banyak kasus tanah aset Pemprov Bali yang dikelola pihak ketiga yang retribusinya tidak jelas dan pengelolaannya tidak maksimal. "Misalnya pengelolaan tanah pertanian oleh masyarakat di kabupaten dan kota. Tidak maksimal hasilnya karena mereka tidak ada pembinaan oleh pemerintah. Hasilnya asal-asalan saja. Retribusinya berapa? Belum terdata dengan rapi. Kami mau telusuri itu," ujar politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani Bangli ini.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi pertanian, Ketut Tama Tenaya, mendorong Pemprov Bali supaya penataan aset berupa tanah ada target penuntasan, agar tidak terus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita minta Pemprov Bali punya target penataan soal aset, karena aset ini menjadi temuan dari tahun ke tahun. Disamping itu memang banyak aset-aset yang dikelola pihak ketiga yang retribusinya perlu dievaluasi," ujar politisi PDIP asal Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. **nat**

• DOK NUSABALI

Edisi : Senin 8 Juni 2015

Hal : 3



Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa Akhirnya Cair

★ Hari Ini Pembayaran Terhadap 19 Desa

SINGARAJA, NusaBali

Para perbekel dan perangkat desa kini bisa bernafas lega. Pasalnya, penghasilan tetap (Siltap) mereka yang selama lima bulan tidak kunjung diterima, kini mulai dicairkan. Pencairan itu setelah proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rampung hingga disahkan. Rencananya, Siltap itu mulai dicairkan Senin (8/6) hari ini. "Mulai besok, (Senin hari ini, red), dana-dana dalam APBDes itu sudah bisa dicairkan, sehingga Siltap bagi perbekel dan perangkat desa juga bisa dibayarkan," ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Minggu (7/6).

Dijelaskan, ada 19 Desa yang sudah bisa mencairkan setelah APBDes mereka dinyatakan rampung dan sudah disahkan. 19 Desa itu antara lain disebutkan, Desa Bengkel, Gobleg, dan Kaliasem di Kecamatan Banjar; Desa Kekeran, Titab, Subuk, Tirtasari, Sepang, dan Telaga di Kecamatan Busungbiu, Desa Sanggalangit, Pemuteran, dan Gerogak di Kecamatan Gerogak, Desa Bubunan, Kalisada, dan Banjarasem di Kecamatan Seririt, Desa Nagasepeha, dan Pegadungan di Kecamatan Buleleng, Desa Tampekan di Kecamatan Kubutambahan, dan Desa Galungan di Kecamatan Sawan. "Ini akan terus berkembang, untuk besok (Senin, red) sudah ada 19 desa yang akan terima pembayaran," terang Sandhiyasa.

Menurut Sandhiyasa, dengan pencairan dana APBDes itu, penghasilan bagi perbekel dan perangkat desa di 19 desa itu bisa segera dibayarkan. Masalahnya, selama ini yang menghambat pencairan penghasilan bagi perbekel dan perangkat desa adalah belum rampungnya penyusunan APBDes. Selain itu, masih juga ada desa-desa yang justru harus menyelesaikan dulu laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk tahun 2014.

Para perbekel dan perangkat desa di Buleleng sempat mengeluh lantaran mereka belum terima penghasilan selama lima bulan periode Januari-Mei 2015. Di antara perbekel dan perangkat desa yang belum terima penghasilan, terpaksa ngutang di luar karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi. Mereka yang ngutang karena satu-satunya pendapatan mereka hanya dari penghasilan sebagai aparat pemerintahan di desa. Akibat belum cairnya penghasilan para perbekel dan perangkat desa itu dikawatirkan mandegnya pelayanan masyarakat di desa.

Selama ini, Pemkab Buleleng melalui BPMPD telah



PERANGKAT desa saat aksi beberapa waktu lalu.

menempuh upaya pendampingan ke desa-desa bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Bagian Hukum, untuk mempercepat penyusunan RAPBDes. Pemkab Buleleng menyadari eluhan dari para perbekel dan perangkat desa yang belum terima penghasilan hingga lima bulan. Namun, didalam penyusunan RAPBDes itu perlu kehati-hatian disamping ada regulasi yang juga ditengah penyusunan RAPBDes sehingga RAPBDes yang sudah rampung harus disempurnakan lagi. Disebutkan aturan itu berupa perubahan PP 60 menjadi PP 22 yang menyebut besaran dana ke desa yang bersumber dari APBN. Dalam PP 60 tahun 2014, besaran dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 16 miliar lebih dengan pembagian berdasarkan syarat luas wilayah, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk. Nah, ditengah penyusunan terbit PP 22 tahun 2015, dimana dana desa dari APBN besarnya bertambah hingga menjadi sebesar Rp 36,8 miliar. Perubahan itu juga menyebut, pembagiannya ke masing-masing desa tidak lagi seratus persen berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, melainkan hanya 10 persennya berdasarkan syarat tersebut. **k19**

Edisi : Senin, 8 Juni 2015

Hal : 4